



LAPORAN KINERJA

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Tahun 2015



Nomor: LAP-111/DL/2/2016
Tanggal: 25 Januari 2016

KATA PENGANTAR

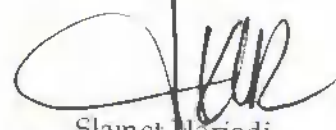
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan karunia dan ridho-Nya kami dapat melewati tahun 2015 dengan lancar.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP) merupakan salah satu unit kerja BPKP yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan. Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015 disusun untuk melaporkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi mandat yaitu Kepala BPKP.

Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP menggambarkan target dan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdiklatwas BPKP yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP periode 2015-2019. Analisis dilakukan terhadap celah kinerja (*performance gap*), yaitu perbedaan capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyusun langkah antisipatif dalam rangka peningkatan kinerja Pusdiklatwas BPKP di masa depan.

Akhirnya, diharapkan Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKP secara keseluruhan.

Ciawi, 25 Januari 2015
Kepala Pusat,



Slamet Hariadi
NIP. 19590411 198101 1 001



BAB I PENDAHULUAN

Pusdiklatwas BPKP merupakan unit kerja eselon II di lingkungan BPKP yang memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan. Tugas, fungsi, wewenang, aspek-aspek strategis, kegiatan dan layanan organisasi, struktur organisasi, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklatwas BPKP menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, dan teknis;
2. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
3. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembentukan, pengembangan, dan penjurangan jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis;
5. Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjurangan jabatan fungsional auditor;

6. Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporannya; dan
7. Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi BPKP, yaitu “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”, Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk mendukung pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ketiga BPKP yakni mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui peran strategis dalam penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan latihan di bidang pengawasan.

Peran strategis tersebut ditunjukkan dalam visi Pusdiklatwas BPKP untuk menjadi lembaga diklat pengawasan intern yang terdepan dan terpercaya.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung oleh Tiga Bidang dan satu Bagian yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Diklat, Bidang Penyelenggaraan Diklat JFA, dan Bidang Penyelenggaraan Diklat Kedinasan dan Teknis serta Bagian Tata Usaha.

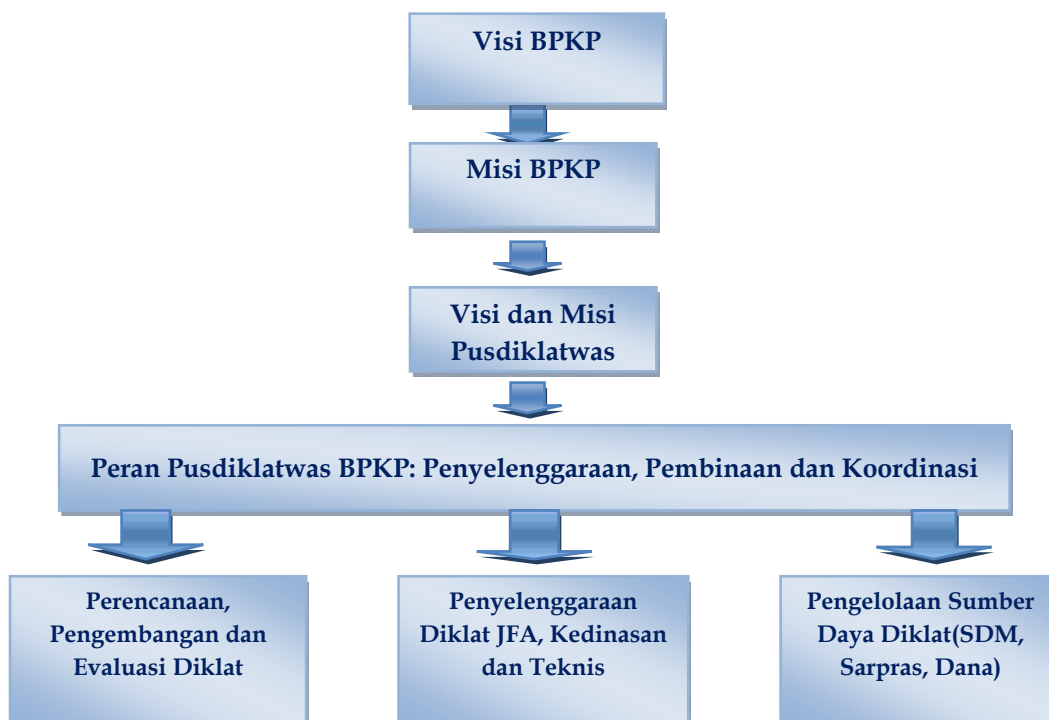
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat berperan meningkatkan efektivitas dan efisiensi diklat pengawasan melalui penyusunan rencana dan program/jenis diklat yang relevan dan selalu *up-date* sesuai kebutuhan *stakeholder*, pengembangan modul, bahan ajar dan metodologi diklat berbasis teknologi informasi, penyiapan penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan diklat fungsional auditor, serta evaluasi pelaksanaan dan hasil diklat. Bidang Penyelenggaraan Diklat JFA dan Bidang Penyelenggaraan Diklat Kedinasan dan Teknis berperan meningkatkan kualitas produk/layanan diklat

pengawasan melalui penyelenggaraan diklat yang profesional/terstandardisasi. Bagian Tata Usaha berperan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya diklat yaitu SDM, sarana prasarana, dan dana.

Dengan demikian, Pusdiklatwas BPKP berperan sebagai penyelenggara, pembina dan koordinator dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi diklat pengawasan, menyelenggarakan diklat pengawasan maupun mengelola sumber daya diklat pengawasan (SDM, sarpras, dana). Pusdiklatwas BPKP dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas dalam penyelenggaraan diklat pengawasan di lingkungan BPKP maupun APIP lainnya. Produk/layanan diklat pengawasan yang berkualitas tersebut didefinisikan sebagai diklat yang sesuai standar penyelenggaraan diklat. Tanpa adanya dukungan produk/layanan penyelenggaraan diklat yang memadai, maka sebagian tugas dan fungsi BPKP, khususnya dalam pengembangan kapabilitas APIP, yang telah digariskan oleh pemerintah tidak akan tercapai. Peran Pusdiklatwas BPKP diilustrasikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

PERAN PUSDIKLATWAS BPKP



C. Kegiatan dan Layanan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pengawasan yang kompeten dan berintegritas, Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan BPKP, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi Lainnya diantaranya POLRI, TNI, Rumah Sakit, dan Perguruan Tinggi/Universitas. Pelaksanaan diklat dibiayai dengan dana yang berasal dari Rupiah Murni (DIPA), PNBPN, dan STAR.

Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP BPKP terdiri atas:

1. Diklat Kedinasan yaitu:

- Prajabatan Golongan II,
- Prajabatan Golongan III,
- Kepemimpinan Tingkat IV,
- Kepemimpinan Tingkat III.

2. Diklat Teknis Substansi

Diklat Teknis Substansi diantaranya diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Audit Investigatif, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RLKPD), Reviu Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (RLKKL), Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ), Pengelolaan Keuangan Daerah, Audit Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Penyusunan LAKIP, Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Audit Forensik, Audit Berbasis Risiko, Manajemen Pengawasan, Analisis Pemecahan Masalah, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruar, *Self Assessment Good Corporate Governance*, Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Berbasis Akruar, Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA) - STAR 2015*, *Training Officer Course*, *Certified Professional Management Accountant (CPMA)*, *Training of Trainer (ToT)* Instruktur, Pengawasan dan Pengendalian Tingkat Utama, Peningkatan Kapabilitas APIP, Diklat dan Uji

Kompetensi Auditor Forensik (CFrA), Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan SIMDA, Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD, Manajemen Resiko Sektor Publik, Pengelolaan BLUD, Managerial Korwas/ Auditor Madya, Statistika Terapan pada Penelitian Pengawasan, Sistem Pengendalian Intern BUMN/D/BUL(Coso), Audit Lintas Sektoral, *Information Resources Management*, Teknis Kepengacaraan dan Penyusunan *Legal Opinion*.

Pelaksanaan diklat Teknis Substansi dengan sistem *E-Learning blended model* yaitu Diklat Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, dan Reviu Laporan Keuangan Pemda. Sedangkan dengan sistem *Full E-Learning* yaitu Diklat Manajemen Pengawasan.

3. Diklat Fungsional Auditor yaitu:

- Pembentukan Auditor Terampil,
- Pembentukan Auditor Ahli,
- Penjurangan Auditor Muda,
- Penjurangan Auditor Madya,
- Penjurangan Auditor Utama.

Diklat Sertifikasi Auditor telah dikembangkan dengan sistem diklat *E-Learning* yang dikombinasikan dengan diklat tatap muka (*blended model*).

Pengembangan sistem diklat *E-Learning blended model* tersebut untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dalam rangka mendukung pengawalan pengelolaan keuangan Negara atau daerah yang membutuhkan auditor intern pemerintah. Dengan sistem tersebut akan mampu mempercepat proses penyelenggaraan diklat dalam menciptakan auditor baru untuk memenuhi kekurangan auditor di Indonesia. Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Auditor dengan sistem *E-Learning blended model* yaitu Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Pembentukan Auditor Trampil.

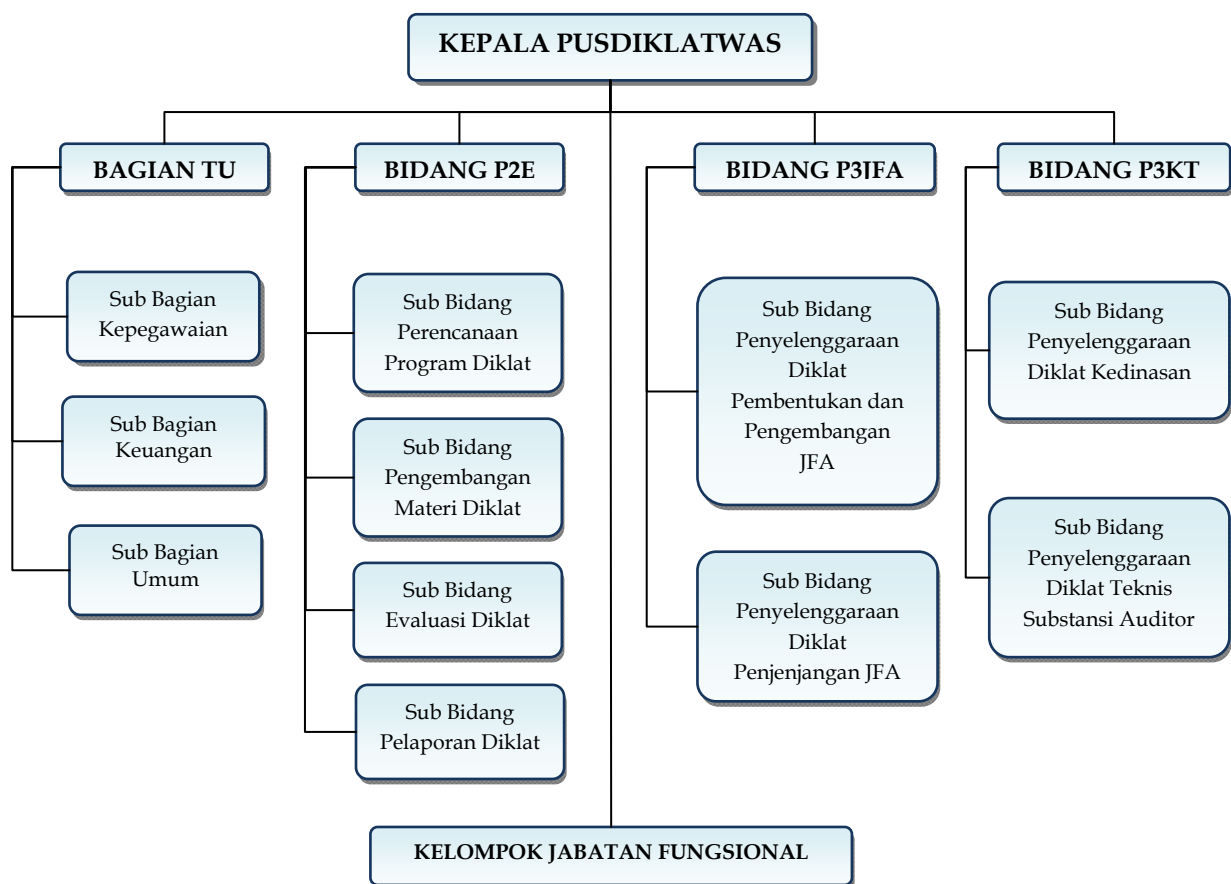
D. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusdiklatwas BPKP dipimpin oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP, yang membawahi satu Bagian Tata Usaha dan tiga Bidang. Bagian Tata Usaha membawahi tiga subbagian. Bidang Perencanaan,

Pengembangan, dan Evaluasi (P2E) membawahi empat subbidang. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (P3JFA) membawahi dua subbidang. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis (P3KT) membawahi dua subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP disajikan pada Gambar 1.2.

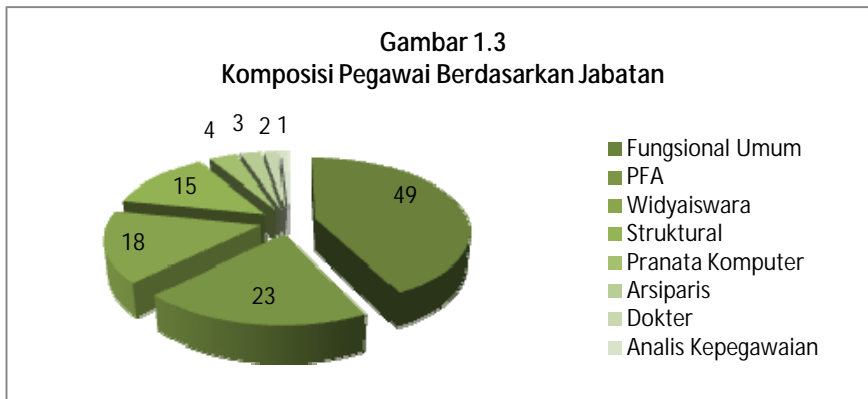
Gambar 1.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLATWAS BPKP



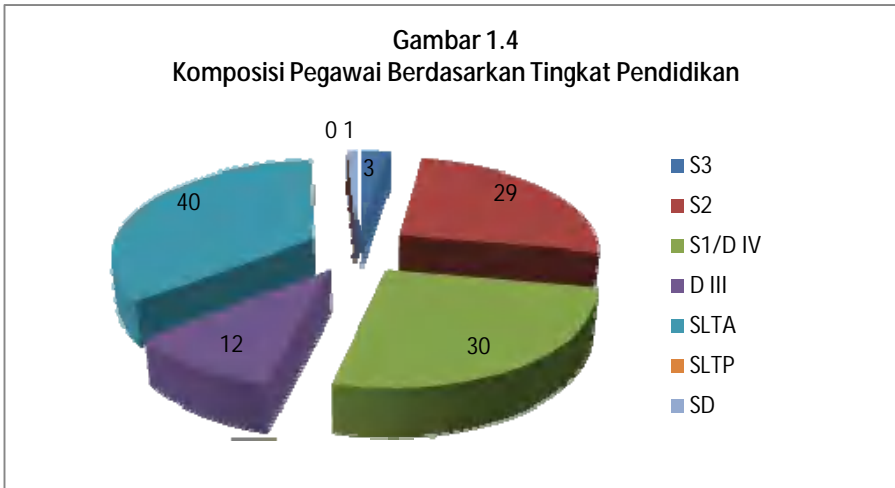
Sumber daya manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2015 sebanyak 200 orang terdiri dari 115 orang Pegawai Negeri Sipil dan 85 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Rincian Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan jabatan, pendidikan, dan golongan dapat dilihat pada gambar 1.3.

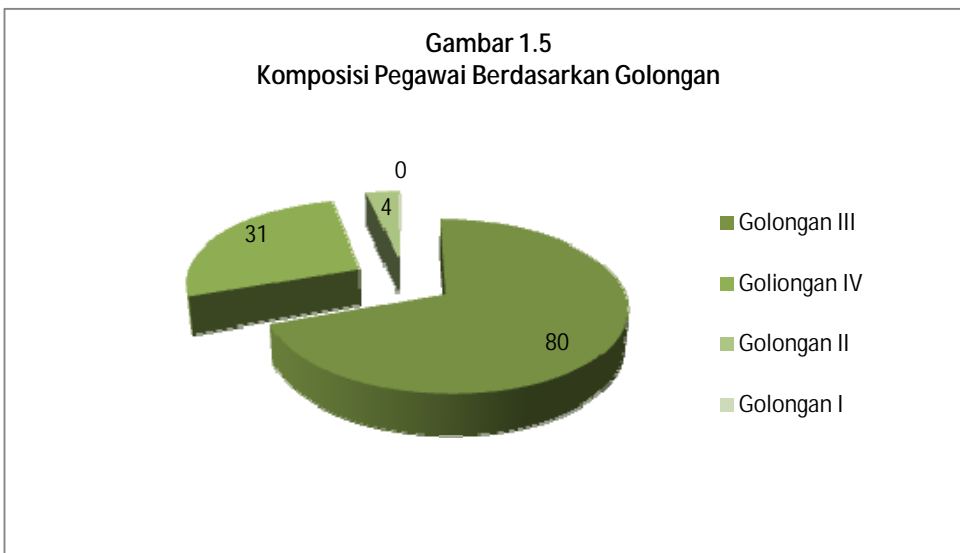


Berdasarkan gambar 1.3 tersebut di atas, Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP jika diklasifikasikan berdasarkan jabatan, terdiri atas: fungsional umum berjumlah 49 orang, fungsional auditor berjumlah 23 orang, widyaiswara berjumlah 18 orang, pejabat struktural berjumlah 15 orang, pranata komputer berjumlah 4 orang, arsiparis berjumlah 3 orang, dokter berjumlah 2 orang, dan analisis kepegawaian berjumlah 1 orang.

Komposisi pegawai Pusdiklatwas BPKP berdasarkan pendidikan, yaitu pegawai dengan latar belakang pendidikan S3 berjumlah 3 orang, S2 berjumlah 29 orang, S1/DIV berjumlah 30 orang, DIII berjumlah 12 orang, SLTA berjumlah 40 orang, dan SD berjumlah 1 orang. Komposisi pegawai Pusdiklatwas BPKP berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.4.



Sedangkan komposisi pegawai Pusdiklatwas BPKP berdasarkan golongan, yaitu pegawai golongan IV berjumlah 31 orang, golongan III berjumlah 80 orang, dan golongan II berjumlah 4 orang, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.5.

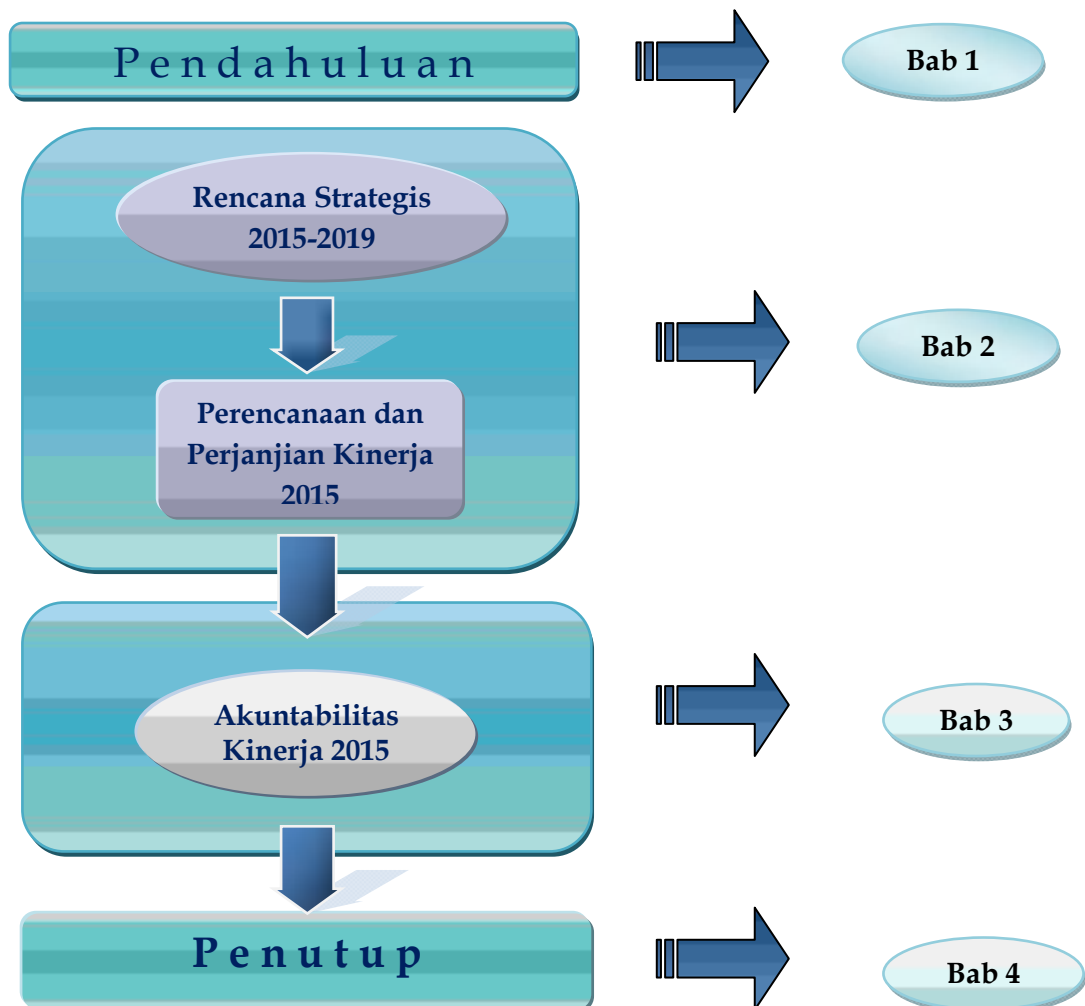


E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP disusun untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusdiklatwas BPKP selama tahun 2015. Capaian kinerja tahun 2015 dihitung dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja tahun 2015. Sistematika Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP terdiri dari empat bab dengan materi sajian sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA





BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP dan rencana kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Pusdiklatwas tahun 2015-2019, sehingga menjadi titik tolak dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja selama periode 2015-2019. Uraian Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sebagai berikut:

A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP

Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Renstra BPKP) tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan secara berjenjang, maka Pusdiklatwas BPKP sebagai unit kerja eselon II di lingkungan BPKP menjabarkan Renstra BPKP ke dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP tahun 2015-2019.

Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program beserta indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Visi Pusdiklatwas BPKP disusun dengan mengacu kepada visi BPKP 2015-2019, yaitu sebagai **“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”**. Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk mendukung pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ketiga BPKP, yaitu mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dapat mempercepat pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Pusdiklatwas BPKP secara terus-menerus mengembangkan diri menjadi lembaga profesional di bidang kediklatan, dengan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Pengembangan bahan ajar yang *up to date* berbasis kompetensi menggunakan perangkat multimedia, dan metode pembelajaran secara elektronik dengan sistem *on line* yang dapat di akses oleh seluruh aparat Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi, yaitu:

**“Menjadi Lembaga Diklat Pengawasan Intern
yang Terdepan dan Terpercaya”**

Makna dari visi tersebut berarti bahwa Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan jenis-jenis diklat, khususnya yang relevan dengan pengawasan intern yang dibutuhkan oleh *stakeholders* disertai penerapan metodologi *training* yang modern berbasis teknologi informasi. Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu bertindak selangkah lebih maju menjadi pelopor atau mempunyai inisiatif dalam pengembangan konsep-konsep, yang kemudian diimplementasikan untuk kepentingan *stakeholders*, dan menjadi terpercaya dengan terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kediklatan untuk *stakeholders*.

2. Pernyataan Misi

Misi Pusdiklatwas BPKP merupakan bentuk nyata dari rumusan visi yang memberikan gambaran mengenai tugas yang diemban oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam dua rumusan misi, yaitu:

"Meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern"

dan

"Meningkatkan Kapabilitas Manajemen dan Sumber Daya Kediklatan"

Misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi *stakeholders* dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada aspek pendukung, berupa peningkatan kualitas manajemen diklat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya diklat lainnya.

3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan mengacu kepada misi yang telah dirumuskan dan selaras dengan tujuan BPKP, maka tujuan strategis Pusdiklatwas BPKP adalah:

a. Pemanfaatan Kompetensi SDM Terdiklat untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Rumusan tujuan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan strategis, ditetapkan sasaran strategis dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019. Pusdiklatwas BPKP mengemban tugas untuk mewujudkan dua sasaran strategis yaitu:

- a. **Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern**
- b. **Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan standar penyelenggaraan diklat**

Sasaran strategis tersebut di atas dilengkapi dengan indikator sasaran strategis yang akan diukur setiap tahun dalam periode 2015-2019, dengan target tahunan sebagaimana tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	%	70	70	70	70	70

5. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Pusdiklatwas BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. Penetapan indikator dilaksanakan dengan mempertimbangkan

tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). IKU Pusdiklatwas BPKP adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015-2019
1.	Pemanfaatan kompetensi SDM terdiktat untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	70%

6. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Dalam periode 2015-2019, telah ditetapkan Program BPKP sebanyak dua program yaitu:

- a. Program Teknis: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- b. Program Generik: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP.

Sebagai unit kerja yang memberikan layanan dukungan, Pusdiklatwas ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan/kelancaran program BPKP tersebut, dengan melaksanakan dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam periode Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019. Program, sasaran program, dan indikator kinerja program, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program
Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat

Sedangkan untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut dilaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan
Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Intern BPKP dan APIP	Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM, dan Kompetensi	Jumlah peserta diklat Kedinasan, Teknis Substansi, dan Fungsional Auditor
		Standarisasi/ Sertifikasi, Perencanaan, dan Monev Kinerja	1. Jumlah laporan penyelenggaraan ujian 2. Jumlah sistem

			diklat berbasis kompetensi
2.	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alat pengolah data BPKP 2. Terlaksananya rehabilitasi berat mess Pusdiklatwas 3. Tersedianya peralatan dan fasilitas Perkantoran Pusdiklatwas
3.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan		

B. Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Perjanjian Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya. Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan interim dan tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut berisi, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai

indikator kinerja dan targetnya. Perjanjian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahun 2015
1.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan SPIP	Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	%	70

Untuk mendukung pencapaian IKU tersebut di atas dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Target Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2015
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Intern BPKP dan APIP	Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM, dan Kompetensi	Jumlah peserta diklat Kedinasan, Teknis Substansi, dan Fungsional Auditor	Orang	7.750
		Standarisasi/ Sertifikasi, Perencanaan, dan Monev Kinerja	1. Jumlah laporan penyelenggaraan ujian	Laporan	3
			2. Jumlah sistem	Paket	1

			diklat berbasis kompetensi		
2.	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert	1. Tersedianya alat pengolah data BPKP	Unit	15
3.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan		2. Terlaksananya rehabilitasi berat mess Pusdiklatwas	M2	305
			3. Tersedianya peralatan dan fasilitas Perkantoran Pusdiklatwas	Unit	94

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung dengan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Intern BPKP dan APIP sebesar Rp 78.962.983.000,00, Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2.530.500.000,00, dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan sebesar Rp 19.292.870.000,00,. Total anggaran adalah sebesar Rp 100.786.353.000,00.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP

Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Pusdiklatwas BPKP. Pengukuran dilakukan terhadap target kinerja yang diperjanjikan tahun 2015 dalam dokumen perjanjian kinerja 2015. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, akan dilakukan pengukuran terhadap pencapaian sasaran program tahun 2015. Pada tahun 2015 Pusdiklatwas BPKP melaksanakan dua program yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015 akan dilakukan pengukuran terhadap program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, dengan sasaran program yang juga merupakan sasaran strategisnya, adalah “Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern”.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2016 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Selain pengukuran kinerja sasaran program, dilakukan juga analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap IKU dengan cara membandingkan capaian IKU dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian IKU lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Capaian sasaran program Pusdiklatwas BPKP berdasarkan capaian sasaran kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Sasaran program “meningkatkan kompetensi SDM aparat pengawasan inter pemerintah dan aparatur negara di bidang penyelenggaraan sistem pengendalian intern” diukur dengan IKU berupa “Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat”. Realisasi IKU “Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat” adalah sebesar 77,48 % atau mencapai 110,68% dari target tahun 2015 sebesar 70%.

Capaian IKU “Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat” diukur dari “rasio antara jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya dibandingkan dengan jumlah peserta diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat”.

Jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya adalah akumulasi dari jumlah peserta diklat JFA yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi auditor, jumlah peserta diklat kedinasan yang dinyatakan lulus, dan jumlah peserta diklat teknis substansi yang berdasarkan hasil *pre test* dan *post test* meningkat nilainya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja, jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya sebanyak 7.266 orang atau **77,48 %** dari jumlah peserta

diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat sebanyak 9.378 orang. Dengan demikian capaian sasaran program adalah sebesar **110,68%** dari target sebesar **70%**.

Meskipun capaian kinerja sudah melampaui target, namun terdapat satu realisasi *output* indikator kinerja sistem diklat berbasis kompetensi, yang belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena belum semua diklat tersedia modul/bahan ajar diklat dan belum semua penyelenggaraan diklat teknis substansi dilaksanakan pengukuran atas hasil diklat melalui *pre test* dan *post test*.

IKU "Presentasi SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat" dicapai melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Intern BPKP dan APIP, Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Intern BPKP dan APIP dan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana dengan indikator kinerja kegiatan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Intern BPKP dan APIP dan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Output			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah peserta diklat Kedinasan, Teknis Substansi, dan Fungsional Auditor	Orang	7.750	9.378	121,01
2.	Jumlah laporan penyelenggaraan ujian	Laporan	3	3	100,00
3.	Jumlah sistem diklat berbasis kompetensi	Paket	1	0,895	0,895

4.	Tersedianya alat pengolah data BPKP	Unit	243	243	100,00
5.	Terlaksananya rehabilitasi berat mess Pusdiklatwas	M2	1.601	1.601	100,00
6.	Tersedianya peralatan dan fasilitas Perkantoran Pusdiklatwas	Unit	167	167	100,00

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Intern BPKP dan APIP,
dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah peserta diklat Kedinasan, Teknis Substansi, dan Fungsional Auditor

Indikator kinerja “Jumlah peserta diklat kedinasan, teknis substansi, dan fungsional auditor” diukur dengan menghitung jumlah peserta diklat kedinasan, teknis substansi, dan fungsional auditor yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 9.378 orang atau mencapai 121,01% dari target tahun 2015 sebanyak 7.750 orang.

Realisasi sebanyak 9.378 orang adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta diklat kedinasan sebanyak 151 orang
- 2) Peserta diklat teknis substansi sebanyak 6.331 orang
- 3) Peserta diklat fungsional auditor sebanyak 2.896 orang

Selain realisasi peserta diklat kedinasan, teknis substansi, dan fungsional auditor, juga terdapat realisasi penilaian assessment, workshop, dan rintisan pendidikan program DIV sebanyak 290 orang

b. Jumlah laporan penyelenggaraan ujian

Indikator kinerja “Jumlah laporan penyelenggaraan ujian” diukur dengan menghitung jumlah laporan penyelenggaraan ujian yang dihasilkan.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 3 laporan atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 3 laporan.

Realisasi sebanyak 3 laporan adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor Periode Maret 2015
- 2) Laporan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor Periode Agustus 2015
- 3) Laporan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor Periode November 2015

c. Jumlah sistem diklat berbasis kompetensi

Sistem diklat berbasis kompetensi adalah penyelenggaraan diklat yang pesertanya telah memenuhi persyaratan tertentu, modul/bahan ajar yang digunakan dalam proses kediklatan memenuhi unsur *knowledge* (teori) dan *skill* (praktik/latihan), adanya pengukuran atas hasil diklat melalui *pre test* dan *post test*, serta diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta diklat.

Indikator kinerja “Jumlah sistem diklat berbasis kompetensi” diukur melalui empat unsur/komponen, yaitu:

- 1) Peserta telah memenuhi kriteria, yang diukur dengan terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2015 seluruh peserta diklat secara formal telah memenuhi kriteria sehingga memperoleh nilai maksimal 1.
- 2) Terpenuhinya unsur *knowledge* (teori) dan *skill* (praktik/latihan) dalam modul/bahan ajar diklat, yang diukur melalui pemenuhan unsur tersebut dalam modul/bahan ajar diklat dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2015 telah dilakukan pengukuran, belum semua modul/bahan ajar diklat yang digunakan memenuhi unsur *knowledge* (teori) dan *skill* (latihan) dengan nilai sebesar 0,89 dari nilai maksimal 1.
- 3) Adanya pengukuran atas hasil diklat melalui *pre test* dan *post test* yang diukur dengan terlaksananya *pre test* dan *post test* dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan pengukuran atas hasil diklat melalui *pre test* dan *post test* dan memperoleh nilai sebesar 0,69 dari nilai maksimal 1.

4) Diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta yang diukur dengan perbandingan jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikat diklat dengan jumlah peserta diklat dengan nilai maksimal 1. Selama tahun 2015, seluruh peserta diklat telah memperoleh sertifikat sehingga memperoleh nilai maksimal 1.

Realisasi *output* didapatkan dari hasil pengukuran keempat unsur tersebut dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh masing-masing unsur (3,58) dibagi dengan jumlah unsur (4) sehingga nilai akhir sebesar 0,895.

Realisasi output ini masih belum memenuhi target 1, hal ini disebabkan karena belum semua modul/bahan ajar diklat yang digunakan memenuhi unsur *knowledge* (teori) dan *skill* (latihan) dan belum semua penyelenggaraan diklat teknis substansi dilaksanakan pengukuran atas hasil diklat melalui *pre test* dan *post test*.

Selain indikator kinerja tersebut di atas, terdapat indikator kinerja:

- a. Jumlah paket pengembangan *e-learning* dengan realisasi sebanyak 1 paket atau 100% dari target sebanyak 1 paket.
- b. laporan kegiatan pengelolaan sumber daya pengawasan, dengan realisasi sebanyak 20 laporan atau 100% dari target sebanyak 20 laporan.
- c. Layanan perkantoran, dengan realisasi sebanyak 12 bulan atau 100% dari target sebanyak 12 bulan.
- d. Gedung/bangunan, dengan realisasi sebanyak 290 m² 100% dari target sebanyak 290 m²

2. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Tersedianya alat pengolah data BPKP

Indikator kinerja “Tersedianya alat pengolah data BPKP” diukur dengan menghitung jumlah alat pengolah data BPKP yang diadakan.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 243 unit atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 243 unit. Sesuai Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP target indikator kinerja adalah 15 unit sehingga realisasinya akan mencapai

1620%. Namun sesuai dengan revisi anggaran target kinerja bertambah menjadi 243 unit, sehingga realisasi 100%.

Realisasi sebanyak 243 unit adalah sebagai berikut:

- 1) LCD Projector sebanyak 3 unit
- 2) Printer sebanyak 4 unit
- 3) Scanner sebanyak 4 unit
- 4) Kursi Hydro sebanyak 200 unit
- 5) Perbaikan UPS (penggantian baterai kering) sebanyak 20 unit
- 6) Mesin Presensi sebanyak 4 unit
- 7) Water Filter sebanyak 2 unit
- 8) Water Heater sebanyak 6 unit

b. Terlaksananya rehabilitasi berat mess Pusdiklatwas

Indikator kinerja “Terlaksananya rehabilitasi berat mess Pusdiklatwas” diukur dengan menghitung rehabilitasi berat yang dilaksanakan pada mess Pusdiklatwas.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 1601 m² atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 1601 m². Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015 target indikator kinerja adalah 305 m² sehingga realisasinya akan mencapai 524,92%. Namun sesuai dengan revisi anggaran target kinerja bertambah menjadi 1601 m², sehingga realisasi 100%.

Realisasi sebanyak 1601 m² adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi gedung mess Denpasar sebanyak 617 m²
- 2) Rehabilitasi gedung mess Pusdiklatwas sebanyak 984 m²

c. Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran Pusdiklatwas

Indikator kinerja “Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran Pusdiklatwas” diukur dengan menghitung jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran Pusdiklatwas yang diadakan.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 167 unit atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 167 unit. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015 target indikator kinerja adalah 94 unit sehingga

realisasinya akan mencapai 177,65%. Namun sesuai dengan revisi anggaran target kinerja bertambah menjadi 167 unit, sehingga realisasi 100%.

Realisasi sebanyak 167 unit adalah sebagai berikut:

- 1) Scanner DRM sebanyak 1 unit
- 2) Lift Passenger sebanyak 1 unit
- 3) Sound System Class sebanyak 3 unit
- 4) AC Split (mess 3A) sebanyak 16 unit
- 5) AC Split (mess Denpasar) sebanyak 16 unit
- 6) Lemari pakaian (mess Denpasar) sebanyak 12 unit
- 7) Nakas (mess Denpasar) sebanyak 12 unit
- 8) Meja belajar (mess Denpasar) sebanyak 12 unit
- 9) Kursi balkon (mess Denpasar) sebanyak 14 unit
- 10) Round table meeting sebanyak 16 unit
- 11) Tempat tidur (mess Denpasar) sebanyak 24 unit
- 12) Mesin cuci sebanyak 4 unit
- 13) Peralatan outbound sebanyak 1 unit
- 14) Mesin potong rumput sebanyak 10 unit
- 15) TV sebanyak 5 unit
- 16) Papan Flipchart sebanyak 15 unit
- 17) White board sebanyak 4 unit
- 18) Perbaikan hydran dan instalasi sebanyak 1 unit
- 19) Perbaikan panel dan kapasitor bank dan genset sebanyak 1 unit

3. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan, dalam perjanjian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015 tidak ditentukan sasaran kegiatan dan indikatornya. Realisasi diukur dengan menghitung jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan yang dihasilkan.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 12 laporan atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 12 laporan.

4. Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP, kegiatan ini tidak masuk dalam perjanjian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015. Sasaran kegiatan adalah tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan. Realisasi diukur dengan jumlah dokumen. Indikator kinerja "Jumlah dokumen laporan kegiatan pengelolaan sumber daya pengawasan" diukur dengan menghitung jumlah dokumen yang diadakan.

Realisasi indikator kinerja sebanyak 49 dokumen atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak 49 dokumen.

Realisasi sebanyak 49 dokumen adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebanyak 1 dokumen
- b. Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) sebanyak 1 dokumen
- c. Dokumen Laporan Kinerja (Lapkin) sebanyak 1 dokumen
- d. Dokumen Laporan Budaya Kerja sebanyak 2 dokumen
- e. Dokumen Laporan GDN sebanyak 12 dokumen
- f. Dokumen Pemrosesan kenaikan pangkat terpadu sebanyak 2 dokumen
- g. Dokumen Penyusunan RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran sebanyak 3 dokumen
- h. Dokumen Laporan Keuangan (bulanan, semesteran, tahunan) sebanyak 14 dokumen
- i. Dokumen Perencanaan Kebutuhan sebanyak 1 dokumen
- j. Dokumen Laporan BMN sebanyak 1 dokumen
- k. Dokumen Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi sebanyak 2 dokumen
- l. Laporan Kehumasan sebanyak 4 dokumen
- m. Dokumen Program Pelatihan Mandiri sebanyak 4 dokumen
- n. Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP sebanyak 1 dokumen

B. Realisasi Keuangan

Pada tahun 2015, Pusdiklatwas BPKP melaksanakan dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Realisasi anggaran dua program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Nilai Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusdiklatwas BPKP tahun 2015

No	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Capaian Setelah Revisi (%)
		Perkin	Revisi IV		
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP	21.823.370.000	27.915.309.000	26.811.498.508	96,05
2.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	78.962.983.000	87.628.286.000	63.114.921.517	72,03
	Jumlah	100.786.353.000	115.543.595.000	89.926.420.025	77,83

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut di atas, program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP menyerap anggaran sebesar Rp 26.811.498.508 atau mencapai 96,05% dari nilai anggaran setelah revisi sebesar Rp 27.915.309.000 dan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP menyerap anggaran sebesar Rp 63.114.921.517 atau mencapai 72,03% dari nilai anggaran setelah revisi sebesar Rp 87.628.286.000. Total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 89.926.420.025 atau mencapai 77,83% dari nilai anggaran setelah revisi sebesar Rp 115.543.595.000.

Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan karena:

1. Adanya perubahan kebijakan dalam pembayaran uang harian peserta diklat untuk H-1 (satu hari sebelum hari diklat) dan H+1 (satu hari setelah hari diklat) yang telah dianggarkan untuk dibayarkan dengan tarif uang harian penuh, namun pelaksanaannya untuk tahun 2015 dibayarkan dengan uang saku diklat.
2. Adanya penghematan dalam realisasi penyelenggaraan diklat STAR karena diklat dilaksanakan menggunakan fasilitas instansi pemerintah, sementara kegiatan tersebut telah dianggarkan dengan pembiayaan model *full board* di hotel.
3. Lamanya pengadaan konsultan pengembangan *e-learning* terkait perolehan penetapan peserta tender (proses nol) yang baru ditetapkan di bulan Oktober 2015.

Realisasi penggunaan sumber daya manusia (OH) atas dua program yang dilaksanakan Pusdiklatwas BPKP yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Rencana dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia (OH)
Pusdiklatwas BPKP tahun 2015**

No	Program	Rencana OH	Realisasi OH	Capaian OH (%)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP	9.772	6.730	68,87
2.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	31.065	27.981	90,07
	Jumlah	40.837	34.711	85.00

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut di atas, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP menggunakan sumber daya manusia sebanyak 6.730 OH atau mencapai 68,87% dari rencana sebanyak 9.772 OH. Sedangkan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP menggunakan sumber daya manusia sebanyak 27.981 OH atau mencapai 90,07% dari rencana sebanyak 31.065 OH.

Total menggunakan sumber daya manusia sebanyak 34.711 OH atau mencapai 85 % dari rencana sebanyak 40.837 OH.

Keberhasilan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015 ditunjukkan dengan prestasi yang dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Pusdiklatwas BPKP sejak tahun 2007 telah menerapkan standarisasi proses kerja yang diakui secara internasional, dengan diperolehnya Sertifikat ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh TUV NORD Indonesia. Setiap tahun dilakukan audit oleh TUV NORD Indonesia untuk meyakinkan bahwa standarisasi proses kerja kediklatan masih berjalan dengan baik. Pada bulan Juli 2015, telah dilakukan Re-Sertifikasi dan diperoleh kembali Sertifikat ISO 9001:2008 dari TUV NORD, Registrasi Sertifikat No.16 100 0632, No. Audit Report I-632/2015 tanggal 6 Juli 2015 untuk jangka waktu tiga tahun, sampai dengan tanggal 1 Juli 2018.
2. Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan pendelegasian kewenangan Akreditasi Lembaga Diklat dalam Menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) setelah melalui proses akreditasi Diklat Teknis dan Fungsional. Hasil penilaian akreditasi Diklat Teknis dan Fungsional telah diumumkan oleh Deputy Bidang Pembinaan Diklat Aparatur, LAN pada tanggal 10 Desember 2015, akreditasi untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tahun 2020 (Surat Keputusan dan Sertifikat masih dalam proses di LAN).
3. Akreditasi "A" dari Lembaga Administrasi Negara untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I,II, dan III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan Tingkat III (sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2033/1/1/9/2010 tanggal 13 Desember 2010) yang berlaku

sampai dengan tanggal 12 Desember 2015. Akreditasi ini dapat dipertahankan kembali melalui proses Re-akreditasi, yang hasil penilaian Re-akreditasi telah diumumkan oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur, LAN pada tanggal 18 Desember 2015, akreditasi untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tahun 2020 (Surat Keputusan dan Sertifikat masih dalam proses di LAN).


4. Pusdiklatwas BPKP seringkali menjadi tempat tujuan kegiatan studi banding, tempat studi lapangan peserta diklat, dan mendapatkan kunjungan kehormatan dari instansi/lembaga diklat lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas BPKP diakui sebagai lembaga diklat yang dapat menjadi rujukan atau contoh bagi lembaga diklat lain.

Pada tahun 2015 Pusdiklatwas BPKP mendapatkan kunjungan kehormatan dari instansi/lembaga diklat lain diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. PT Angkasa Pura I (Persero) dalam rangka studi banding tentang Pembangunan dan Pengimplementasian Sistem E-Learning di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tanggal 4 Juni 2015.
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka studi banding untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga (institusi) Lembaga Pendidikan di lingkungan Pendidikan, dengan fokus pengembangan Bahan Ajar yang meliputi prosedur penyusunan, pihak-pihak yang terkait, dan pembiayaannya pada tanggal 6 Juli 2015.
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka studi lapangan diklat bagi peserta diklat *Training Officer Course* (TOC) pada tanggal 15 Oktober 2015.
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka studi banding tentang pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan pada tanggal 22 Oktober 2015.
- e. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Makasar (BKD) dalam rangka studi banding bagi para penyelenggara Diklat di Lingkup BKD Makasar tentang perencanaan diklat, pelaksanaan diklat (penetapan calon peserta, manajemen

pelaksanaan diklat, praktek diklat administrasi, sarana prasarana diklat, dan monitoring dan evaluasi diklat pada tanggal 5 November 2015.

- f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG dalam rangka studi banding tentang Program monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu diklat, penyusunan kurikulum, peran widyaiswara selaku *instructional designer*, penyelenggaraan *Distance Learning/E-learning*, dan Administrasi penyelenggaraan diklat pada tanggal 11 November 2015.
- g. Delegasi Vietnam yang berasal dari Inspektorat Kementerian Konstruksi Republik Sosialis Vietnam. Mereka hendak melakukan rangkaian kunjungan /studi banding ke beberapa instansi pemerintah RI, Pusdiklatwas menjadi tujuan pertama mereka untuk mempelajari tentang internal audit pemerintah pada tanggal 1 Desember 2015.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP merupakan pertanggungjawaban kinerja Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai sasaran program dan sasaran kegiatan tahun 2015. Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, Pada tahun 2015 Pusdiklatwas BPKP melaksanakan dua program yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2015 dilakukan pengukuran terhadap Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, dengan sasaran program “Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern”.

Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (*output*). Capaian sasaran program tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015

No.	Sasaran Program	Capaian Indikator Outcome (%)
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern”.	110,68

Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa, capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern” pada tahun pertama capaian Renstra periode 2015-2019 telah mencapai 110,68% dari target sebesar 70%.

Keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Pusdiklatwas BPKP untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Pusdiklatwas BPKP tidak menjadi tanggung jawab suatu bidang atau bagian saja, melainkan suatu gabungan kontribusi dari semua bidang dan bagian terkait.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Pusdiklatwas BPKP untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut bukan merupakan suatu akhir tetapi merupakan tantangan bagi Pusdiklatwas BPKP untuk berusaha lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari *stakeholder*. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP mulai dari pengelola, tenaga pengajar, penyelenggara, penyusun kurikulum, penganalisis kebutuhan diklat hingga pengelola sistim informasi, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, diantaranya dengan mengikuti diklat *Training Officer Course (TOC)*, *Training Of Trainer (TOT)* Instruktur, , Perencanaan dan analisis kebutuhan diklat.

2. Menyempurnakan dan mengembangkan modul serta program-program diklat agar selalu *up to date* dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, diantaranya diklat manajemen resiko sektor publik, reviu rencana kerja anggaran, pengelolaan barang milik daerah, dan audit PNPB.
3. Mengembangkan alat peraga diklat yang dapat membantu tenaga pengajar melakukan *transfer of knowledge* kepada peserta diklat dan membantu peserta diklat memahami materi diklat yang diberikan, diantaranya alat peraga diklat pemahaman atas auditan, penilaian resiko, identifikasi dan evaluasi tingkat pengendalian, pengumpulan bukti audit keuangan, perencanaan audit.
4. Mengembangkan program kediklatan berbasis *e-learning* sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas dan mempercepat proses penyelenggaraan diklat yaitu dengan sistem *E-Learning blended model* dan *Full E-Learning*.
5. Melengkapi dan menyempurnakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat yang selama ini dilakukan, dengan memastikan terlaksananya mekanisme tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat terutama evaluasi terhadap widyaiswara, materi diklat, dan sarana prasarana.
6. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan akreditasi bagi lembaga diklat lain untuk menyelenggarakan diklat fungsional auditor dan diklat teknis substansi, setelah diperolehnya pendelegasian kewenangan akreditasi lembaga diklat dari LAN.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga kontribusi Pusdiklatwas BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

**KINERJA SASARAN STRATEGIS DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2015
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Keuangan			SDM (OH)			Penggunaan Dana	Penggunaan SDM/OH
							Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%	Rencana	Realisasi	%	Efisien/Tidak Efisien	Efisien/Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Proentase ratio SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	%	70	77,48	110,69	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	27.915.309	26.811.498,5	0,9605	31.065	27.981	0,90	Efisien	Efisien
						Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	87.628.286	63.114.921,5	0,7203	9.772	6.730	0,69	Efisien	Efisien

**PERBANDINGAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2014
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)
			2014	2015		2014	2015	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=8-7
Meningkatkan Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Prosentase ratio SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	%	137,61	77,48	N/A	152,9	110,68	N/A

CAPAIAN KINERJA OUTPUT
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
TAHUN 2015

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja <i>out-put</i>	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Dana (Rp000)			SDM (OH)			
								Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Meningkatkan Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Internal BPKP dan APIP	1. Jumlah Peserta Diklat Kedinasan, Teknis Substansi dan Fungsional Auditor	orang	7.750	9.378	121,01	83.076.339,000	58.912.963,289	72,00	29.490	26.481	89,80	
			2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor	laporan	3	3	100,00	4.551.947,000	4.201.958,228	92,31	1.575	1.500	95,24	
			3. Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Kompetensi	paket	1	0,895	89,50	25.308.209,000	21.942.772,239	86,70	7.769	4.803	61,82	
		2. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	4. Tersedianya alat pengolahan data BPKP	unit	243	243	100,00	236.600,000	446.853,000	188,86	1	43	4.300,00	
			3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan	5. Terlaksananya rehabilitasi berat mess Pusdiklatwas	M ²	1.601	1.601	100,00	850.000,000	2.682.459,769	315,58	1	25	2.500,00
				6. Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran Pusdiklatwas	unit	167	167	100,00	1.520.500,000	1.739.413,500	114,40	1	144	14.400,00

**PERBANDINGAN REALISASI *OUTPUT* TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2014
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP**

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja <i>out-put</i>	Satuan	Target	Realisasi		Naik/ (Turun) 8=7-6
						2014	2015	
1	2	3	4	5	6	6	7	8=7-6
1.	Meningkatkan Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Internal BPKP dan APIP	1. Jumlah Peserta Diklat Kedinasan, Teknis Substansi dan Fungsional Auditor	orang	7.750	8.928	9.378	450
			2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor	laporan	3	3	3	0
			3. Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Kompetensi	paket	1	0,989	0,895	(0,094)
		2. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	4. Tersedianya alat pengolahan data BPKP	unit	243		243	N/A
		3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan	5. Terlaksananya rehabilitasi berat mess Pusdiklatwas	M ²	1.601		1.601	N/A
			6. Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran Pusdiklatwas	unit	167		167	N/A